

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Indonesia merupakan salah satu negara agraris di Asia Tenggara. Indonesia berupa gabungan dari 5 pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua serta dengan ribuan pulau kecil lain. Indonesia bisa dikatakan negara yang memiliki lahan atau tanah yang sangat besar di Asia Tenggara, tetapi menjadi negara besar juga membawa kelemahan yaitu pemerintah pusat tidak dapat melakukan perkembangan dan pengendalian daerah-daerah secara langsung dan pemerintah pusat juga tidak mampu melakukan pemerintahan sekaligus untuk seluruh daerah di Indonesia. Dengan itu, Indonesia menganut sistem pemerintah desentralisasi. Menurut UU NO.32 tahun 2004, sistem desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dengan sistem pemerintahan ini, pemerintah-pemerintah daerah yang diberikan hak untuk melakukan pengendali daerah masing-masing, harus mencari pendapatan daerah atau modal untuk melakukan perkembangan daerah masing-masing. Salah satu pendapatan untuk dijadikan modal pembangunan daerah adalah pajak (Muljono, 2008: 3).

Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, telah menyebabkan

perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan lebih bertanggungjawab, untuk menangani urusan pemerintah didasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban senyatanya serta benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dan tujuan nasional (Muljono, 2008: 3). Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dan daerah lainnya, dalam arti mampu membangun kerjasama yang baik antar daerah dan juga menjamin hubungan serasi dengan pemerintah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi unsur rumah tangganya (Supramono, 2010: 5).

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tujuannya antara lain adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat yang sehat antar daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan potensi serta

keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendorong timbulnya inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib memberikan pembinaan misalnya dengan pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, pengawasan, bimbingan, pelatihan dan evaluasi. Disamping itu Pemerintah juga wajib memberikan fasilitas yang berupa kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD).

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:15) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Halim (2004:96) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur utama

PAD. Sumber-sumber Pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah itu sendiri terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
 - d. Pendapatan Asli Daerah lain yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Pendapatan daerah lain yang sah

Pada sumber pendanaan diatas, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen penyumbang terbesar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari pembayaran pajak itu sendiri akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di daerah yang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Tony Marsyahrul (2003:98) “Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBN)”.

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu dari pajak daerah. Dari data diatas, dengan adanya pajak Hotel dan Restoran ternyata memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam, terutama sejak adanya kebijakan otonomi daerah dan didukung dengan kondisi Kota Batam sebagai kota

pariwisata. Selain memberikan sumbangan PAD yang besar, hotel dan restoran juga mampu membuka atau memberikan lapangan pekerjaan yang luas serta mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Batam.

Kota Batam memiliki Hotel dan Restoran yang lumayan banyak. Menurut DISPENDA kota Batam, hotel yang ada di Kota Batam mencapai 178 hotel yaitu 1 hotel bintang lima , 42 hotel bintang empat dan tiga , dan sisanya hotel bintang dua dan satu. Sedangkan restoran yang ada di Kota Batam mencapai 307 restoran dan itu hanya hotel dan restoran yang sudah tercatat atau lapor diri pada kantor pajak (data tersebut didapatkan dari website DISPENDA kota Batam www.dispenda.batamkota.go.id) . Perkembangan perhotelan dan restoran di Kota Batam bisa dikata pesat dikarenakan Kota Batam merupakan kota pariwisata dan tempat yang strategis. Kota Batam dikatakan kota pariwisata karena di seluruh Pulau Sumatera, yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan adalah Kota Batam. Menurut laporan dari Dinas Pariwisata Provinsi Kepri yang tercatat pada tahun 2015, total wisatawan mencapai 1.514.119 wisatawan dan sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 1.5 juta wisatawan. Dan Kota Batam dikatakan strategis karena letak kota Batam dekat dengan negara Singapura & Malaysia dan merupakan salah satu gerbang keluar masuk ke negara Australia sehingga banyak mendatangkan orang-orang asing.



Gambar 1.1 Letak geografi kota Batam

Dan letak strategis ini juga mendorong perkembangan perhotelan dan restoran terutama letaknya dengan Singapura karena sebagian besar wisatawan yang datang ke Kota Batam adalah warga negara Singapura. Dan bukan di segi pariwisata saja, Singapura juga membantu dalam perkembangan di segi perekonomian dan teknologi.

Usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, mengalami berbagai kendala, baik dari segi keterbatasan sumber dana maupun dari segi kemampuan dan sistem pengelolaan serta administrasinya. Kondisi permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan pendapatan daerah tidak sama pada masing-masing daerah, karena menyangkut tersedianya sumber, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber-sumber yang ada. Dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus mengetahui sumbangan pajak daerah termasuk di dalamnya pajak Hotel dan Restoran maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini sehingga dapat mengetahui kontribusi pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Pemerintah Kota Batam dan apakah ada faktor yang

menghambat pengelolaan pajak Hotel dan Restoran serta upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Batam.

1.2 Identifikasi Masalah

Kota Batam memiliki jumlah wisatawan yang banyak dan hal ini sangat mempengaruhi terhadap pendapatan hotel dan restoran, dan itu berarti pajak yang dibayarkan hotel dan restoran kepada Dinas Kepajakan akan bertambah. Dengan ini, dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah berapa besaran pajak hotel dan restoran yang diterima oleh pemerintah Kota Batam dan adakah faktor penghambat dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran.

1.3 Pembatas Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang harus dipecahkan agar pembahasan tidak terlalu luas dan tetap mengarah sesuai judul, maka diperlukan pembatasan masalah. Dalam pembahasan ini penulis akan membatasi pembahasan penelitian yaitu pajak hotel dan pajak restoran untuk mengetahui seberapa besar nilai kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2006 sampai tahun 2015?
2. Apakah ada pengaruh kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2006 sampai tahun 2015?
3. Apakah ada pengaruh kontribusi pajak hotel dan pajak restoran secara simultan terhadap Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2006 sampai tahun 2015?
4. Apakah ada faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran tahun 2006 sampai tahun 2015 dan upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran dalam tahun 2006 sampai tahun 2015?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Batam periode tahun anggaran 2006-2015.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Batam periode tahun anggaran 2006-2015.
3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kontribusi Pajak Hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah

Kota Batam tahun 2006-2015.

4. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Batam dalam proses pengelolaan pajak Hotel dan Restoran dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan pajak Hotel dan Restoran.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Manfaat yang diharapkan dapat dicapai adalah:

1. Bagi Pemerintah Kota Batam

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Batam dalam evaluasi untuk mengembangkan pajak hotel dan restoran kota Batam.

2. Bagi Universitas Putra Batam

Penelitian ini diharapkan menambah referensi bagi perpustakaan Universitas Sanata Dharma dan sebagai tolak ukur bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian mengenai pajak hotel dan restoran.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang di dapat mengenai pajak hotel dan restoran serta menambah pengetahuan bagi penulis.